



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nursusanti Rajab

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7,
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: nursusantirajab@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the cash expenditure accounting system at the Regional Financial and Asset Management Agency in Kuantan Singingi Regency. The research method used is descriptive qualitative method. The data of this research are primary data and secondary data. Data collection techniques used are documentation, interviews, and observations. The data analysis technique used is by comparing the cash expenditure accounting system at BPKAD Kuantan Singingi Regency with the Governments Regulation of Republic of Indonesia Number 12 of 2019 concerning Guidelines for Regional Financial Management in Regional Governments and conducting a comparative analysis of cash expenditure systems at BPKAD. The results showed that the implementation of the Accounting System for cash disbursements conducted by BPKAD was in accordance with Governments Regulation of Republic of Indonesia Number 12 of 2019.

Keywords: Accounting System, Cash expenditure, Reginal Finance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara membandingkan sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah dan melakukan analisis perbandingan sistem pengeluaran kas pada BPKAD. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran kas yang dilakukan oleh BPKAD sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Pengeluaran Kas, Keuangan Daerah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia untuk hidup secara lebih praktis dan mudah, segala kemudahan ingin dicapai untuk dapat menemukan kepuasan pada setiap tindakan dalam segala bidang. Salah satu



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

diantaranya muncul yang dinamakan sistem. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dengan ada sistem dan prosedur tersebut tujuan perusahaan dapat tercapai (Mulyadi, 2016: 56).

Dalam setiap perusahaan atau instansi, akuntansi memegang peranan yang sangat penting karena fungsi akuntansi dapat memberikan informasi mengenai keuangan dari suatu perusahaan. Menurut Surwadjono (2016: 73) Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Setiap organisasi, entitas atau perusahaan harus dikelola dengan baik agar tujuan yang ingin dicapai oleh instansi atau perusahaan dapat tercapai. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh manajemen dengan mengolah informasi-informasi yang diperoleh dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik adalah pengambilan keputusan yang didasarkan oleh informasi yang tepat dan akurat.

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja dikategorikan dalam dua hal yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam penerapan konsep akuntansi di setiap organisasi, institusi pemerintahan maupun perusahaan, kas merupakan salah satu akun penting dalam menjalankan aktifitas vital operasional yang dijalankan. Namun, penggunaannya sering disalahgunakan dan mudah dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas otorisasi kas tersebut, terutama dalam penerimaan dan pengeluaran kas. Aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang efektif dan efisien menjadi pertimbangan bagi suatu institusi pemerintahan dalam menggunakan dana dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan.

Suatu instansi sebaiknya mempunyai sistem akuntansi pengeluaran kas yang baik, karena bila instansi tersebut tidak memiliki suatu sistem akuntansi pengeluaran kas yang baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang paling sering digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran, salah satunya digunakan untuk belanja langsung, dimana hal tersebut bisa dikatakan dapat banyak menelan dan rawan terjadi penyelewengan dan berada dalam pengelolaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Terjadi banyak perubahan dan pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggaran, perbendaharaan, sampai pada pertanggungjawaban laporan keuangan. Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah sebelum bergulirnya otonomi daerah hanya berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Kepala Daerah/Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas, dan Neraca yang diberlakukan mulai 1 Januari 2001, namun pada saat



Juhanperak

e-issn : 2722-984X

p-issn : 2745-7761

itu Pemerintah Daerah masih belum memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi acuan dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya. Adapun prosedur akuntansi yang diterapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal 233 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

Upaya untuk memperkuat akuntabilitas, maka setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan bertanggungjawab atas laporan keuangan. Kepala Daerah/Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk mewujudkan transparansi telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang pada intinya pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat, konsekuensinya setiap pemerintah daerah harus membangun sistem informasi keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu yang mengalami perubahan yang mendasar dengan ditetapkannya Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan adanya kedua Undang Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran (Darise, 2011: 1).

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan suatu organisasi pemerintahan yang di kepalai oleh seorang Kepala Badan yaitu Hendra, AP, M.Si. Didirikan BPKAD ini untuk melaksanakan tujuan yaitu untuk terwujudnya tata kelola keuangan dan aset pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang baik, profesional, dan handal.

Dalam rangka mempermudah pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan Pengeluaran Kas, yang sebelumnya proses pelaporan masih secara manual, sekarang sudah tersistem dengan komputerisasi mulai Tahun 2017 lalu. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah (BPKAD) sudah menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk pengelolaan keuangan keuangan daerah. SIPKD merupakan aplikasi yang di bangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi ini juga dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.



Sistem ini telah mencakup aplikasi-aplikasi seperti modul perencanaan, anggaran, kas, akuntansi, gaji, pendapatan sebagai perangkat penunjang manajemen keuangan daerah.

Aplikasi SIPKD ini sangat memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya karena mudah dipahami. Selain itu, kerahasiaan data sangat terjaga melalui teknologi yang dikembangkan dan dapat membantu dalam pengelolaan sesuai kebutuhan administrasi keuangan, lebih mudah, transparan, cepat serta akurat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan data pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan BPKAD Hendra, AP., M.Si. pada hari Selasa 07 April 2020 menjelaskan, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terdapat 70 orang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif bekerja dan beliau juga menjelaskan tentang Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang di kelola oleh Bagian Akuntansi pada BPKAD yaitu menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Kepala Bagian Belanja ini juga menjelaskan bahwa aplikasi SIPKD pada BPKAD sudah diterapkan pada Tahun 2017 lalu, dan beliau juga menjelaskan tentang penerapan SIPKD ini terdapat kendala yang dialami, adapun kendala tersebut adalah jaringan internet SIPKD yang masih kurang bagus dan sering terjadi eror karna virus dalam aplikasi yang mengakibatkan terjadinya masalah dalam pengimputan data aplikasi SIPKD, serta kurangnya Sumber daya manusia (SDM) dalam menggunakan aplikasi SIPKD ini.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan daerah meliputi prosedur akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Akuntansi Selain Kas. Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh pengeluaran kas. Pengeluaran kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah.

Setiap instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Peraturan pemerintah yang menjadi pedoman untuk penelitian ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai acuan penelitian menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Andrew (2013). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrew ini adalah pada variabel yang diteliti yaitu menganalisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Kemudian perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrew adalah pada penelitian terdahulu peneliti mengambil sampel di BPBD Sulawesi Utara sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel pada



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andrew (2013), hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi Utara sudah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem

Pengertian Sistem Menurut Krismiaji (2015:1) sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi Menurut Halim (2004: 4) Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.1.3 Sistem Akuntansi

Menurut Krismiaji (2015: 217) menyatakan sistem akuntansi terdiri atas metoda dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait.

2.1.4 Akuntansi Pengeluaran Kas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 pasal 247 akuntansi pengeluaran kas pada OPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 terdiri atas:

Dokumen yang digunakan

1. Surat Penyedia Dana (SPD).
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
3. Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Catatan akuntansi yang digunakan

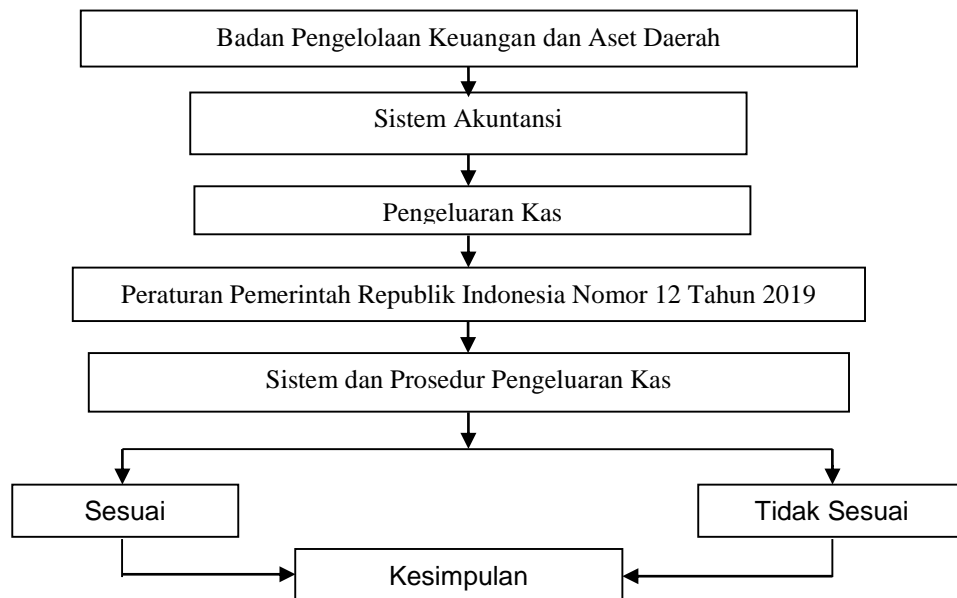


1. Buku jurnal pengeluaran kas
2. Buku besar
3. Buku besar pembantu

Fungsi Akuntansi yang digunakan

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2. Bendahara Pengeluaran
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

2.2 Kerangka Pemikiran



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasir (2014:211) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang objektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem pengendalian intern terhadap pengeluaran kas. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengelolaan pengeluaran kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Hasil wawancara selanjutnya dicatat sebagai data penelitian. Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data secara subjektif tentang bagaimana Sistem akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan di BPKAD diantaranya: fungsi apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, dokumen apa sajakah yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, dan catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD dan dilihat apakah seluruh indikator tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2015: 45) teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku yang relevan dan kondisi lingkungan yang tersedia di lapangan penelitian. Metode observasi yaitu salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti melihat, mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer (Sugiyono, 2015:204). Observasi dilaksanakan untuk mengetahui langkah-langkah pengeluaran kas. Pengamatan atau observasi yang peneliti lakukan dimulai dari pemberian informasi dari informan, bukti dokumen pengeluaran kas, serta melihat langsung sistem akuntansi pengeluaran kas yang digunakan yaitu aplikasi SIPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014: 244).

Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Penilaian prosedur pengeluaran kas dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan responden yaitu pihak pelaksana pengeluaran kas sehingga diperoleh jawaban berkaitan dengan pokok penelitian. Disamping itu proses dan analisa data



menggunakan langkah editing, yang merupakan langkah meneliti ulang kelengkapan dan kebenaran jawaban yang diperoleh dari responden melalui wawancara sehingga data yang diperoleh akan sesuai dengan pokok penelitian.

Untuk membandingkan hasil temuan lapangan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.4 Langkah-Langkah Analisis Data

1. Langkah pertama adalah melakukan analisis dengan mendeskripsikan dan memahami sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD di Kabupaten Kuantan Singingi. Pendeskripsian meliputi prosedur dan bagan alir yang di pakai dalam sistem akuntansi pengeluaran kas di BPKAD.
2. Langkah kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur sistem akuntansi pengeluaran kas secara deskriptif. Pendeskripsian meliputi komponen sistem akuntansi, dokumen, catatan akuntansi, dan fungsi yang dipakai dalam sistem akuntansi pengeluaran kas.
3. Langkah ketiga adalah membandingkan hasil temuan lapangan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas yang ada di BPKAD dengan kajian teori sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019.
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisis
Analisis hasil perbandingan tersebut berdasarkan index checklist, yaitu dengan menghitung total jawaban “Ya” dibagi total pernyataan dalam checklist dikali seratus persen. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan berdasarkan range persentase index checklist yang diterapkan menurut Dean J. Champion (2002) dalam Sambara (2018) adalah sebagai berikut:

- 0,00 - 0,25 : Tidak Sesuai
0,26 - 0,50 : Cukup Sesuai
0,51 - 0,75 : Sesuai
0,76 - 1,00 : Sangat Sesuai

No	Indikator Pengeluaran Kas	Jawaban		Total	Skor (%)	Kategori
		Ya	Tidak			
1	Dokumen Sistem Akuntansi					
2	Catatan Akuntansi					
3	Fungsi yang digunakan					
Total						

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Membandingkan Penatausahaan Dokumen Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas BPKAD Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

Kesimpulan peneliti dari perbandingan yang didapat dari hasil wawancara dan bukti di lapangan, dokumen yang digunakan sistem akuntansi pengeluaran kas



pada BPKAD dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa Sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD sudah menggunakan ke 4 dokumen yaitu Surat Penyedia Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrew (2013) dengan judul penelitian Analisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi utara ini menggunakan 4 dokumen yaitu Surat Penyedia Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrew (2013) ini menyatakan bahwa dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi Utara sudah sesuai dengan kajian teori.

4.2 Membandingkan Catatan Akuntansi yang digunakan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019

Kesimpulan peneliti dari perbandingan yang didapat dari hasil wawancara dan bukti di lapangan, Catatan Akuntansi yang digunakan sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa Catatan Akuntansi Yang Digunakan sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD sudah menggunakan ke 3 catatan akuntansi pengeluaran kas yaitu, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu dan sudah sesuai dengan teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrew (2013) dengan judul penelitian Analisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi utara ini menggunakan 3 catatan akuntansi yaitu Buku Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar dan buku besar pembantu. Hasil penelitian yang dilakukan Andrew (2013) ini menyatakan bahwa Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi Utaraini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019.

4.3 Membandingkan Fungsi Akuntansi yang digunakan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019

Kesimpulan Peneliti dari perbandingan yang didapat dari hasil wawancara dan bukti di lapangan, fungsi sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD dengan Kajian teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa fungsi terkait sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD sudah menggunakan ke 5 fungsi akuntansi pengeluaran kas yaitu, Pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, kuasa bendahara umum daerah, pejabat penatausahaan keuangan OPD, dan pengguna anggaran/kuasa pengguna



anggaran dan sudah sesuai dengan teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrew (2013) dengan judul penelitian Analisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi utara ini menggunakan 5 fungsi pengeluaran kas yaitu fungsi Pejabat pelaksana teknis kegiatan, fungsi bendahara pengeluaran, fungsi kuasa bendahara umum daerah, fungsi pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan fungsi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrew (2013) ini menyatakan bahwa fungsi terkait yang digunakan oleh BPBD Sulawesi utara dalam sistem akuntansi pengeluaran kas sudah sesuai dengan kajian teori.

4.4 Hasil Analisis Pengeluaran Kas

No	Indikator Pengeluaran Kas	Jawaban		Total	Skor (%)	Kategori
		Ya	Tidak			
1	Dokumen Sistem Akuntansi	42	0	42	1%	Sangat Sesuai
2	Catatan Akuntansi	24	0	24	1%	Sangat Sesuai
3	Fungsi yang digunakan	54	0	54	1%	Sangat Sesuai
Total		120	0	120	1%	Sangat Sesuai

$$\frac{120 \times 100\%}{(120 + 0)} = 1,00\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menurut metode Champion nilai 1,00% menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah efektif.

V. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas sudah sesuai dengan kajian teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019. BPKAD sudah menggunakan keempat dokumen yang harus ada dalam system akuntansi pengeluaran kas yaitu SPD, SPP, SPM, dan SP2D. Berdasarkan temuan yang ada semua dokumen sudah diterapkan dengan baik.
2. Catatan akuntansi yang digunakan dalam system akuntansi pengeluaran kas sudah sesuai dengan kajian teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019. BPKAD sudah menggunakan ketiga catatan akuntansi yang harus ada dalam system akuntansi pengeluaran kas yaitu buku jurnal pengeluaran kas, buku besar dan buku besar pembantu. Berdasarkan temuan yang ada semua catatan akuntansi sudah diterapkan dengan baik.
3. Fungsi terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan kajian teori Peraturan



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019. BPKAD sudah menggunakan kelima fungsi sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan, Bendahara pengeluaran, Pejabat penatausahaan keuangan OPD, Kuasa BUD, dan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Berdasarkan temuan yang ada semua fungsi terkait sudah diterapkan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing I yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak **M. Irwan, SE., MM** selaku pembimbing II yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
5. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Seluruh staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data mengenai penelitian.
9. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda **Syaiful Akmal** dan Ibunda Almarhumah **Sarliyanti** dan Ibunda **Darmiwati**, Kakakku Reny Yandriyani Adikku Nadya Tara Gladova dan Rahmad Azzuhari yang selalu memberikan do'a serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti.
10. Teman-teman seperjuangan Novi, Lesta, Sela, Ketri.



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

11. Kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti, bukan para pemberibantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Badan penerbit Indeks. Jakarta.
- Krismiaji, 2015. Sistem Informasi Akuntansi edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwadjono. 2016. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPF.

Jurnal dan Skripsi:

- Saputra, Marco Andrew. 2013. *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada BPBD Sulawesi Utara*. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sambara, Thalia Amanda. 2018. *Analisis Pengendalian Internal atas Persediaan Barang Dagang (Studi Kasus di PT XYZ)*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.

Peraturan Pemerintah:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.